

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN RASKIN DAN KETAHANAN
PANGAN RUMAH TANGGA DI DESA MEDAN SINEMBAH
KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi dan Mmemenuhi Syarat- syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Ekonomi Pembangunan*

Oleh:

MUHAMMAD ARI FAZLUR RAHIM NST

NPM: 1305180047



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

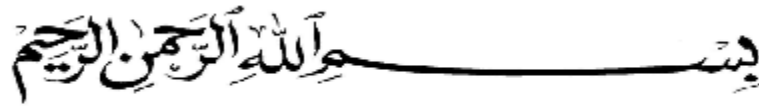
MUHAMMAD ARI FAZLUR RAHIM NST. Efektivitas Kebijakan Raskin Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah.

Pada tahun 2002 pemerintah membuat suatu program untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu Beras Miskin atau biasa di sebut RASKIN. Anggaran pemerintah untuk raskin sebesar rp. 9,98 triliun. Desa Medan Sinembah adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan jumlah penduduk sebanyak 7.589 orang dan 560 rumah tangga yang menerima Raskin.

Maka di ambil sampel sebanyak 85 kepala keluarga dengan menguji secara komparatif, maka di peroleh hasil adanya efektifitas penerima raskin untuk keluarga miskin di desa medan sinembah sangat terbantu dengan adanya program raskin yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga masyarakat desa medan sinembah.

Kata kunci : Program Raskin , Ketahanan Pangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, zat yang ada sebelum kata ada itu ada, yang Maha Indah yang dengan segala keindahan-Nya, zat yang Maha Pengasih dengan segala kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhluk-Nya. Shalawat serta salam mahabbah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Allah terakhir dan penyempurnaan seluruh risalah-Nya. Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ” **Efektifitas Kebijakan Raskin dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah** ”.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. DR. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE,MM,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S, selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE, Msi, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arah dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen mata kuliah Ilmu Ekonomi Pembangunan atas ilmu yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan di akhirat kelak.
6. Bapak/ ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas – berkas yang di butuhkan dalam akademik.

7. Orang tua tercinta (Muhammad Syafii Nst dan Salmah Marpaung) sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah di berikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi.semoga suatu saat penulis dapat membalas kebaikan yang di berikan dan dapat membuat bangga.
8. Buat kakak/abang saya (Vivi dan Ian) yang telah banyak membantu skripsi ini.
9. Teman – teman Ep angkatan 2013 Ilham , Iwan , Evan , Ikram , Doni.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian penulisan, maupun materi penulisan mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis secara pribadi berharap Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Medan, Oktober 2017

Penulis,

M. Ari Fazlur Rahim Nst

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengeluaran Pemerintah	12
2.1 Teori Makro	12
2.2 Teori Mikro	17
B. Pengeluaran Negara.....	19
C. Ketahanan Pangan	22
D. Kemiskinan	23
E. Program Raskin	28
F. Efektivitas	33
G. Penelitian Terdahulu	34
H. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian	44
B. Pembahasan	46

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin sebagai Rumah Tangga Miskin di Desa Medan Sinembah Tahun 2016	6
Tabel 2.1 Indikator Kemiskinan	26
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia	47
Gambar 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	48
Gambar 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak setiap individu. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Tersedianya pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus di penuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta mempunyai basis sumber daya manusia yang berkualitas. Bangsa Indonesia mempunyai basis sumber daya Nasional yang tersebar di seluruh wilayah sebagai tumpuan bagi upaya penetapan dan ketahanan pangan. Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi dengan kontribusi sebesar 50 % atau lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan penggunaan tahun 2011. Konsumsi rumah tangga mencakup konsumsi pangan dan non pangan, tetapi jika di lihat dari kepentingannya, maka konsumsi makanan atau pangan di anggap jauh lebih penting karena merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi agar dapat hidup secara sehat dan produktif. Terpenuhinya kebutuhan pangan di harapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Konsumsi pangan di jamin oleh negara karena pangan di anggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan hal mutlak yang harus di penuhi. Undang-Undang(UU)

No.18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan, dan budaya lokal.

Khususnya di Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terjadinya krisis pangan. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Pemerintah perlu menyediakan persediaan beras yang mencukupi untuk konsumsi sehari-hari rakyatnya dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Namun masih ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena ternyata jumlah masyarakat Indonesia yang mampu membeli beras dengan harga pasar normal masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga berpengaruh pada daya beli mereka terhadap kebutuhan pangan. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah kemiskinan ini seakan tidak pernah berhenti dibahas dan diperhatikan banyak cendekiawan, politisi, bahkan pemuka

agama. Kemiskinan manusia tidak hanya dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah, juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan, atau hidup dalam lingkungan yang tidak aman sehingga berkurangnya kesempatan untuk memperluas kemampuan dan potensinya.

Bank Dunia mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "akses terhadap kecukupan pangan bagi semua orang pada setiap saat untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kehidupan yang aktif". Kedaulatan negara sangat ditentukan oleh kedaulatan pangan. Tanpa kecukupan pangan, suatu negara tidak bisa beradab dan bermartabat. Maka dari itu, sebagai salah satu program kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional, Program Raskin dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan berupa nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Raskin.

Program Raskin merupakan sebuah program beras bersubsidi bagi keluarga miskin yang menyediakan 15 kg beras per rumah tangga miskin dengan harga Rp. 1.600,- per kg. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan. Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin ini antara lain; UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan peraturan pendukung lainnya. Dalam pasal 45 UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dijelaskan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam

rangka mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu dengan melaksanakan Program Raskin. Program Raskin ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan beras bersubsidi yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Dalam Program Raskin, keluarga miskin tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah “Rumah Tangga Sasaran” atau disingkat “RTS”. Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya Beban pengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg. Pada tahap implementasi Program Raskin agar sesuai dengan perencanaannya dan berjalan dengan efektif, diperlukan kesiapan dari semua pihak yang terlibat didalamnya, baik itu Pemerintah Kota, Perum BULOG, Badan Pusat Statistik, Tim Koordinasi Raskin Kota, Tim Koordinasi di tingkat bawah seperti Tim Satuan Kerja Kecamatan hingga tingkat Kelurahan, masyarakat itu sendiri, dan pihak terkait lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan *stakeholder*

tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Dalam hal ini diperlukan adanya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Kota, Tim Satuan Kerja Kecamatan hingga tingkat Kelurahan, masyarakat, Perum BULOG, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahap implementasi ini juga diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat dengan lembaga atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benar-benar memahami rencana yang akan dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya permasalahan dalam pelaksanaan Program Raskin.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai 33 kabupaten kota , salah satu kabupaten yang termasuk luas daerah yang paling besar adalah kabupaten deli serdang yaitu seluas 2.808,91 km² dengan jumlah 22 kecamatan dan kecamatan yang letaknya di pinggiran perbatasan dengan medan adalah tanjung morawa yang merupakan salah satu sentra industri pengusaha Kota Medan. Tanjung Morawa terhubung dengan Medan melalui Tol Belmera. Tanjung Morawa terdiri dari beberapa kelurahan salah satu di antaranya desa medan sinembah.

Di Desa Medan Sinembah masih banyak terdapat masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan pangan pokok berupa beras. Sehingga masih banyak rumah tangga miskin di wilayah ini yang membutuhkan program beras bersubsidi. Banyaknya masyarakat seperti ini dikarenakan tingkat pendapatan yang rendah, dan harga barang-barang kebutuhan yang semakin mahal, salah satunya adalah kebutuhan pangan.

Jumlah keluarga miskin di Desa Medan Sinembah dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin sebagai Rumah Tangga Miskin Di Desa Medan Sinembah Tahun 2016

No	Dusun	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase (%)
1	I	387	68	17,6
2	II	187	102	54,5
3	III	201	54	26,9
4	IV	199	92	46,2
5	V	224	69	30,8
6	VI	199	38	19,1
7	VII	126	22	17,5
8	VIII	158	56	35,4
9	IX	318	59	18,6
TOTAL		1.999	560	31,0

Sumber : Kepala Desa Medan Sinembah

. Dari data yang disebutkan dalam tabel diatas, diketahui bahwa dari 9 Dusun yang ada di Desa Medan Sinembah, dusun II dengan presentase terbesar dalam jumlah keluarga miskin, yaitu hampir mencapai 54,5%. Dari data yang diperoleh, dusun II merupakan salah satu dusun yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbesar di desa medan sinembah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial-ekonomi beberapa masyarakat di daerah tersebut yang masih kekurangan. Dusun II merupakan daerah urban serta tidak memiliki sumber daya alam

sehingga potensi pertanian menjadi kecil kontribusinya, akibatnya kebutuhan bahan pangan sangat tergantung dari pasokan dari daerah sekitarnya. Selain itu, saat ini masih banyak masyarakat dusun II terutama dari Rumah Tangga Sasaran yang mengandalkan Program Raskin didasarkan pada fakta bahwa harga beras Raskin yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga beras di pasaran yang terbilang mahal. Hal ini secara signifikan mampu mengurangi beban pengeluaran hidup mereka. Sehingga dalam hal ini, perlu adanya koordinasi yang terpadu antara pemerintah setempat dengan pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan Program Raskin di Desa ini. Dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar, diasumsikan Desa Medan Sinembah rawan akan konflik atau permasalahan terkait dengan pendistribusian beras Raskin. Data tersebut diperoleh dari Kantor Kepala Desa Medan Sinembah, yang kemudian data tersebut digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai dasar penetapan jumlah penerima manfaat program Bantuan dan Perlindungan Sosial, misalnya program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Raskin. Dalam Program Raskin, penerima manfaat beras bersubsidi tersebut disebut sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah Rumah Tangga Sasaran di Desa masih cukup banyak, sehingga perlu adanya program pengentasan kemiskinan seperti Program Raskin ini guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terbebas dari kemiskinan.

Dari pengamatan penulis, nama nama jumlah warga miskin yang di rekomendasikan untuk mendapatkan penerima program raskin tidak sesuai dengan kriteria indikator – indikator yang di peruntukkan untuk penerima

program raskin, karena banyak menerima raskin yang rumahnya layak huni, listrik memadai, air dari PDAM, mempunyai kendaraan pribadi tetapi justru mereka mendapat jatah program raskin. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam informasi dan pendataan warga penerima program raskin atau database pada tahun – tahun sebelumnya masih digunakan dan belum diperbaharui, dan praktek KKN terjadi sehingga banyak keluarga miskin yang harusnya mendapat raskin tetapi tidak dapat.

Pada tahun sebelumnya pernah terjadi permasalahan dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima, dan jenis permasalahannya relatif sama dari tahun ke tahun. Selain itu masyarakat masih meragukan mengenai sosialisasi dan transparansi program; sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras; biaya pengelolaan program; pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan fungsinya mekanisme pengaduan. Namun dalam kondisi yang terjadi pada masyarakat, sebenarnya jumlah produk yang dialokasikan kepada RTS tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri, yaitu 15kg beras untuk setiap keluarga. Kebanyakan keluarga memiliki jumlah tanggungan yang kalau dengan 15kg beras tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, dimana produk yang diberikan tidak bisa mencukupi keluarga yang memiliki anggota lebih di asumsikan. Sehingga pemerintah pusat harus bisa menyesuaikan kuantitas produk beras untuk ketahanan pangan rumah tangga keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga lebih dari 4 orang.

Selain itu juga hal yang jadi masalah ada adalah ketika produk raskin uangkan apakah itu permintaan warga atau kebijakan pemerintah yang kemudian

digunakan oleh warga justru bukan untuk yang menjadi kebutuhan pokok tetapi cenderung ke hal yang mubazir, tidak jarang masyarakat miskin penerima Program Raskin ini di gunakan kepala keluarga laki – laki sering menggunakan dana raskin ini untuk membeli rokok dan nongkrong di warung kopi yang sudah jelas itu dapat merusak kesehatannya serta mengurangi jam kerja yang seharusnya bisa di gunakan untuk bekerja. Jika uang untuk membeli rokok itu di gunakan untuk membeli susu anaknya itu sudah pasti dapat membantu menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat bagi keluarganya dari sisi kesehatan. Bayangkan jika harga pokok per bungkus Rp. 10.000,00 dan per hari menghabiskan 1 bungkus rokok maka jika di jumlahkan Rp. 10.000,00 x 30 hari = Rp. 300.000,00 perbulan hanya untuk membeli rokok. Hal semacam ini yang membuat masyarakat miskin terus menerus tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “ **Efektifitas Kebijakan Raskin dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi masyarakat miskin di Desa Medan Sinembah.
2. Kuantitas produk raskin selama ini tidak memadai karena tidak di sesuaikan dengan jumlah orang per keluarga.

3. Produk raskin tidak sesuai peruntukkannya karena banyak keluarga mampu mendapat jatah, tetapi justru keluarga miskin tidak dapat.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang di teliti, maka perlu di jelaskan bahwa masalah dalam penelitian yaitu: Responden atau sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga penerima raskin yang ada di Desa Medan Sinembah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektifitas program raskin di Desa Medan Sinembah ?
2. Apakah penerima raskin dapat mengkonversi beras raskin kepada protein dan sejenisnya atau meningkatkan kualitas pengeluaran rumah tangganya ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian yang akan di laksanakan di Desa Medan Sinembah :

1. Melakukan analisis efektivitas untuk jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima raskin di Desa Medan Sinembah
2. Untuk melakukan analisis efektivitas program raskin di bandingkan dengan kualitas pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM).

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan tingkat kesejahteraan rakyat di Desa Medan Sinembah dengan adanya program raskin ini.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Tim Koordinasi Program Raskin dalam melaksanakan Program Raskin sebagai tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras bersubsidi bagi keluarga miskin di Desa Medan Sinembah..
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penelitian dan mengetahui fenomena yang terjadi di Desa Medan Sinembah dan peneliti dapat mengetahui dampak yang di terima oleh penerima program raskin.
4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai refrensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

2.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, menurut Boediono (1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

2.1.1 Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

2.1.2 Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

2.1.3 Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga, untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

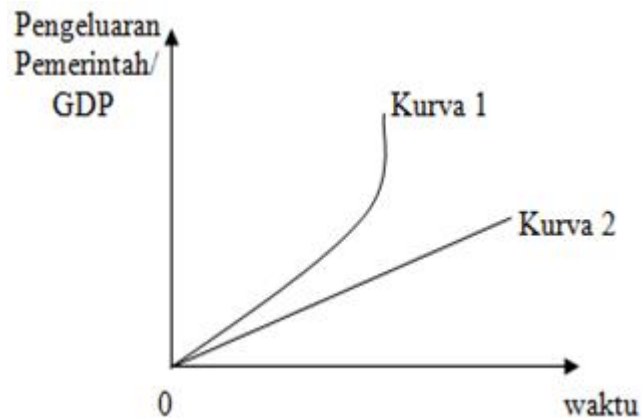
a. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner di sebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama di sebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner dapat di lihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan dan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PPkp}{PPK1} < \frac{PKPPn}{PkPPn} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

PPkp : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita , yaitu GDP/ jumlah penduduk.



Gambar 2.1 Kurva perkembangan pengeluaran pemerintah

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang di sebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva di atas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

b. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini di perkenalkan dan di kembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang di bedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar

dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka di dasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang di butuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktifitas swasta di alihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup di biayai semata mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut jadi pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini di sebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya di laksanakan oleh swasta. Efek ini lah di sebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktifitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

d. Teori batas kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah di perkirakan

kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Di katakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang di ukur dengan pajak dan penerimaan – penerimaan lain, melebihi 25 % dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi inflasi. Dasar yang di kemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan di sediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan di sediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat di rumuskan sebagai berikut :

a. Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

I = individu; = 1,.....,m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta . akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (k) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k . Pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjaga keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat di tolerir masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat di capai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b. Penentuan tingkat output

$U_p = g(X, G, S)$

U_p = Fungsi utilitas

S = keuntungan yang di peroleh spolitisi dalam bentuk materi atau kedudukan

G = vektor barang public

X = vector barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat di wakili seorang pemilih :

$\text{Max } U_i = f(X, G)$

Dengan pemuasan di batasi kendala anggaran seharusnya :

$$PxX + t B < Mi$$

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

Bi = basis pajak individu 1

Mi = total pendapatan individu 1

T = tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat di tentukan oleh 2 proses yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*PriceTaker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

B. Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program – program di mana pengeluaran itu di tujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Macam – macam Pengeluaran Negara

Menurut macamnya, pengeluaran negara di bedakan menjadi 2 yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut Organisasi pengeluaran negara di golongan menjadi 3 yakni :

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah Pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat di bedakan menjadi 2 yaitu meliputi pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain di gunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayar, bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk di alokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana ekonomi khusus penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri.

b. Pengeluaran Provinsi

Jika di pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah Provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari pemungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN di gunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, dan jasa, belanja pemeliharaan, dana perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain – lain dan belanja tak terduga.

c. Pemerintah Kabupaten Kota

APBD dalam Kabupaten/kota di gunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/keseluruhan, bagi hasil pendapatan Desa/Kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan , pengeluaran untuk pembiayaan, terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara di bedakan menjadi 5 antara lain :

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran Investasi adalah pengeluaran yang di tujuksn untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalmya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM dll.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perkonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran untuk pembangunantempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana dll.

d. Pengeluaran Penghematan Masa depan

Pengeluaran Penghematan Masa Depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila di dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di mana yang akan datang , pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun di perlukan oleh pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk biaya perang.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Konsep ketahanan pangan mengandung tiga dimensi yang saling berkait, yaitu :

1. Ketersediaan pangan
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, dan
3. Stabilitas harga pangan.

Sesuatu yang diyakini para ahli adalah apabila salah satu dari dimensi tersebut tidak terpenuhi, suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional. Jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Demikian pula, walaupun ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat dapat dikatakan cukup, jika stabilitas harga pangan tidak mampu terjaga secara baik (dan tentunya berakibat pada ketersediaan dan aksesibilitas), ketahanan pangan tidak dapat dikatakan telah cukup kuat. Di sinilah , peranan sistem insentif harga, terutama pangan pokok seperti beras, atau bahkan jaminan harga bagi petani pada saat musim panen dan jaminan keterjangkauan harga bagi konsumen pada saat musim tanam, masih relevan untuk di diskusikan.

Stabilitas harga menjadi salah satu dimensi yang penting dalam ketahanan pangan karena dapat menimbulkan kosekuensi ekonomi, politik, dan sosial

kemasyarakatan yang berat. Indonesia dan negara-negara berkembang lain melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dengan menjaga atau mengurangi tingkat fluktuasi harga agar tidak terlalu besar. Fluktuasi harga pangan dan komoditas pertanian umumnya terjadi antar waktu karena pengaruh iklim dan cuaca (seasonal variations) serta perbedaan waktu tanam dan waktu panen yang berkisar tiga bulan atau lebih. fluktuasi harga yang cenderung mengarah pada instabilitas harga pangan juga terjadi karena pengaruh lokasi dan wilayah produksi dan konsumsi. Indonesia yang memiliki kondisi geografis demikian tersebar dan beragam, ancaman instabilitas harga pangan dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya biofisik dan sosial ekonomi antar pulau jawa dan luar jawa antara sektor perdesaan dan perkotaan, serta indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. (Bustanul Arifin : 2007)

D. Kemiskinan

Menurut Ravallion (2001) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Di sisi lain Fernandez (2001) menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin di tinjau dari berbagai aspek, antara lain :

1. **Aspek politik** : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

2. **Aspek sosial** : tersingkir dari instuisi utama masyarakat yang ada.
3. **Aspek ekonomi** : rendahnya kulaitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, dan rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
4. **Aspek budaya atau nilai** : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

A. Penyebab Kemiskinan

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat di nikmati oleh sebagian besar anggota masyarakatnya. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang amat beragam dan di tambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya di arahkan untuk memecahkan masalah permasalahan jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah (Mukhopadhyay,1985). Selain itu, kebijakan dalam negeri sering kali tidak terlepas dengan kondisi luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan, antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Fredericks, 1985).

Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyrakat itu sendiri, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang di laksanakan. Atau dengan kata lain, masalah kemiskinan ini selain dapat di timbulkan oleh hal yang

bersifat alamiah atau kultural, kemiskinan juga dapat di sebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pemikir tentang masalah-maslah kemiskinan, sebagian besar hanya memandang fenomena kemiskinan sebagai masalah struktural, yaitu kemiskinan yang di derita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat ikut menikmati sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Sumardjan,1980).

1. Indikator Kemiskinan

a. Tingkat konsumsi Beras

Sajogyo (1997) menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang 240 kg per kapita per tahun dapat di golongan sebagai penduduk miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

Secara lebih terperinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok yaitu :

Tabel 2.1 Indikator Kemiskinan

Kategori	Perdesaan	Perkotaan
a. Melarat	180Kg	270Kg
b. Sangat Miskin	240Kg	360Kg
c. Miskin	320Kg	480Kg

Namun, sejak tahun 1979 kategori “melarat” di hilangkan kemudian di gantikan dengan kategori “nyaris miskin” yaitu dengan 480 kg di daerah pedesaan dan 720 kg di daerah perkotaan.(Sajogyo , dalam BPS,1986)

b. Indikator kesejahteraan rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada pula berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering di gunakan . pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living An Interim Guide* di kemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain: kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama *pareto optimal*. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

Kedua, *pareto non optimal*. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, *pareto superior*. Dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.

Kelemahan dari konsep Pareto Optimal adalah tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar dari distribusi dan redistribusi. Ekonomi kesejahteraan konvensional pada saat mempunyai masalah dalam alokasi dan mencoba memecahkan masalah alokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan nilai yang berubah-ubah dari alokasi tersebut. Pertimbangan nilai yang berubah-ubah tersebut berlaku pada fungsi kesejahteraan konvensional. Pengertian ini bukan dasar yang kokoh dari ilmu ekonomi kesejahteraan (Chowdhury,1999)

c. Indeks Kemiskinan Manusia

Sebenarnya, Indeks Kemiskinan Manusia ini banyak memiliki kemiripan dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yang telah di bahas pada modul sebelumnya. Menurut UNDP, ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu:

- **Tingkat kehidupan**, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- **Tingkat pendidikan dasar**, di ukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan kaum wanita.
- **Tingkat kemampuan ekonomi**, di ukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

E. Program Raskin

Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah dari 3 kluster upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu Kluster I (Bantuan dan Perlindungan Sosial), Kluster II (PNPM Mandiri), dan Kluster III (Kredit Usaha Rakyat). Program Raskin masuk di dalam Kluster I bersama program perlindungan dan bantuan sosial lainnya seperti Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Siswa (BOS). Sepuluh tahun lebih Program Raskin telah dilaksanakan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Karena itu pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk Program Raskin. Namun sebelum mengetahui lebih jelas mengenai Program Beras untuk Keluarga Miskin ini, maka kita perlu mengetahui pengertian kemiskinan terlebih dahulu. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002). Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan. Seseorang/rumah tangga dikatakan miskin bila kehidupannya dalam kondisi serba

kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (BPS dalam (www.kompensasi-bbm.com), 2005).

Tidak ada keraguan bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang hanya dapat dilakukan dengan membantu pengurangan jumlah kemiskinan. Peranan yang krusial dari perkembangan industri dan teknologi, dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang diakui secara luas. (Klaus Bosselmann, 2006:21)

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara yang berkembang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan mencapai keberhasilan pembangunan dengan mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara tersebut. Kemiskinan tersebut dapat ditentukan dengan beberapa kriteria, sehingga mempermudah pemerintah di negara yang bersangkutan dalam mencapai target sasaran yang diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di negara tersebut.

Menurut Riant Nugroho Dwidjowijoto, kriteria kemiskinan yang menggunakan pendekatan gabungan antara konsep kebutuhan dasar dan rumah tangga menghasilkan empat asumsi dasar, yaitu (1) unit masyarakat paling kecil adalah keluarga sehingga status kemiskinan seseorang/individu sangat terkait dengan status kemiskinan keluarga/rumah tangga; (2) setiap rumah tangga miskin selalu beranggotakan individu miskin sehingga keberhasilan menentukan sebuah

rumah tangga miskin berarti menunjukkan keberhasilan menentukan individu-individu miskin dalam sebuah rumah tangga; (3) kebutuhan dasar lebih mudah diformulasikan dalam unit rumah tangga dibandingkan dalam unit individu; (4) tidak setiap individu miskin mampu mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan tidak setiap individu miskin yang mempunyai/memiliki pekerjaan dan penghasilan itu mampu memenuhi standar minimal konsumsi untuk dirinya sendiri (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007 : 152).

Perlu disadari bahwa kemiskinan bukan hanya sederetan angka, tetapi menyangkut nyawa jutaan rakyat miskin, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Sehingga masalah kemiskinan menyentuh langsung nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Masalah kemiskinan ini berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Untuk bisa bermartabat dalam kehidupannya, masyarakat perlu ditopang oleh kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang dikatakan miskin bila keadaannya memang tidak mampu berdiri sederajat dengan lingkungan masyarakat secara memadai (Aep Rusmana, 08 Februari 2006).

Kemiskinan tersebut dapat membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidupnya. Dan, salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan pokok yang dimaksud adalah beras. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras, khususnya untuk

rumah tangga miskin, maka Pemerintah melaksanakan Program Raskin untuk memberikan akses kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Program Raskin merupakan sebuah program beras bersubsidi bagi keluarga miskin yang menyediakan 15 kg beras per rumah tangga miskin dengan harga Rp.1.600 per kg. Program ini adalah program nasional yang bertujuan membantu akses rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini merupakan kelanjutan Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998. Melalui Program Raskin, rumah tangga miskin diringankan beban pengeluarannya sehingga dapat mengalokasikan sisa pendapatannya untuk kebutuhan lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas Program Raskin adalah merupakan tingkat keberhasilan yang menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi.

Pendataan keluarga miskin sebagai RTS dilakukan dalam rangka validasi data calon sasaran penerima Program Raskin dengan menggunakan data sesuai kebijakan yang disusun Badan Pusat Statistik dengan indikator

1. luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang,
2. jenis lantai tanah/bambu/kayu murahan,
3. dinding rumah bambu atau kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester,

4. tidak memiliki fasilitas MCK,
5. penerangan bukan listrik,
6. sumber air minum bukan PDAM/tidak terlindung sungai dan air hujan,
7. tidak memiliki kompor atau menggunakan arang/kayu bakar,
8. membeli daging maksimal 1 kali sepekan,
9. 1 tahun membeli 1 stel pakaian baru,
10. frekuensi makan satu/dua kali sehari,
11. tidak mampu berobat ke Puskesmas/poliklinik,
12. lapangan pekerjaan buruh tani, buruh bangunan dan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600 Ribu per bulan,
13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tidak tamat sekolah,
14. tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp. 500 Ribu, (Sumber: Data BPS).

F. Efektivitas.

Menurut Richard M. Steers efektivitas memiliki arti sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarnya. Kemudian ditegaskan lagi bahwa efektivitas paling mudah dipakai bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan optimum yakni efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasionalnya (1985 : 17).

Menurut Emil Salim (1996 : 94) Efektivitas juga memiliki pengertian sebagai suatu ketepatan dari suatu program tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri.

Kemudian menurut Yutchman dan Seashore (dalam Alo Liliweri, 1997 : 121) bahwa efektivitas organisasi sangat tergantung antara lain oleh bagaimana organisasi secara relatif mengeksplorasi lingkungan dari sumber daya yang langka dan sumber-sumber lain yang bernilai untuk mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa penjelasan di atas bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Handayani (1986 : 6) yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu berorientasi pada pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan dari organisasi. Organisasi dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah, orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas merupakan keberhasilan organisasi dalam menjalankan program atau kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	- Efektivitas Pengelolaan Program Raskin (X) - Kesejahteraan Masyarakat (Y)	- Analisis Regresi Sederhana - Uji Korelasi dan Determinasi	Efektivitas pengelolaan program raskin sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang disebut sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) hal ini ditunjukkan dengan nilai uji t yang menunjukkan bahwa thitung dari variabel

				<p>efektivitas pengelolaan program raskin adalah 32,001 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian, kemampuan variabel efektivitas pengelolaan program raskin dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 73,8%, sedangkan sisanya yang sebesar 26,2%</p>
--	--	--	--	---

				dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini
2	EFEKTIVITAS PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2009	- Ketepatan Komunikasi dan Koordinasi - Transparansi dan Akuntabilitas - Sumber Daya yang Memadai - Sikap Positif Pelaksana - Dukungan dan Partisipasi Kelompok Sasaran	- Analisis Interaktif	Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak krisis global yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan suatu program yang diberi nama "Program Perlindungan

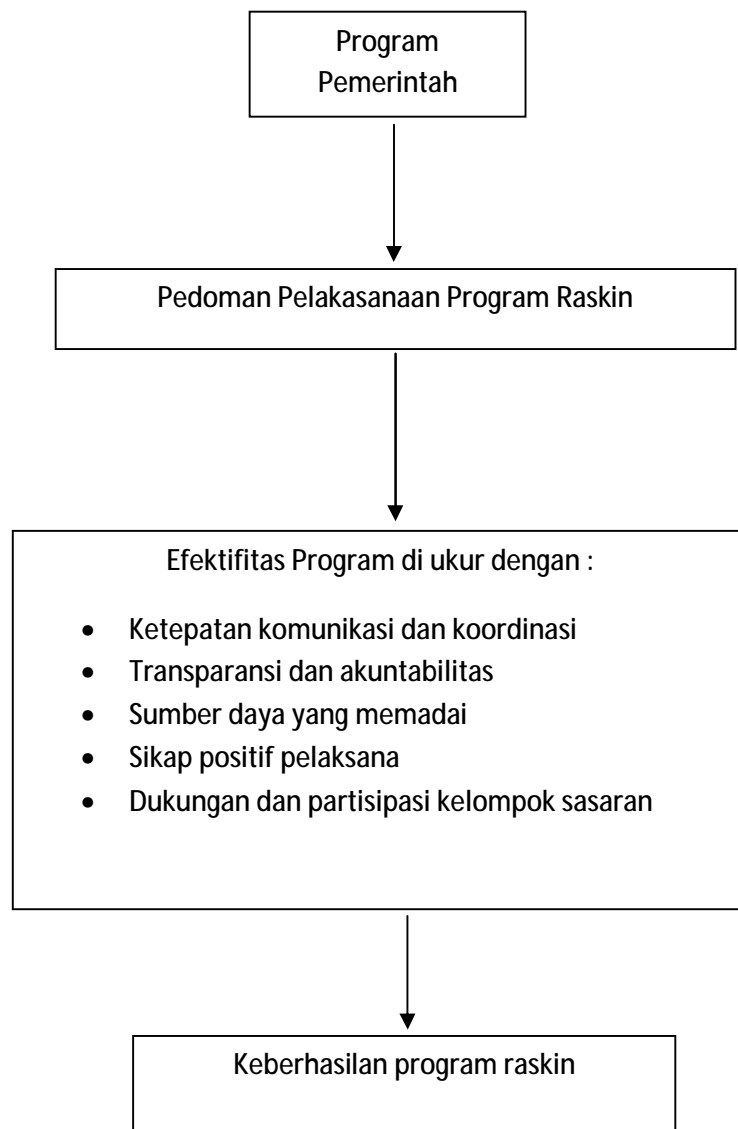
				<p>dan Bantuan Sosial” yang salah satunya adalah di bidang pangan. Program ini diberi nama Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin). Sasaran Program Raskin Tahun 2009 adalah Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin hasil pendataan</p>
--	--	--	--	--

				ulang BPS pada tahun 2008 yang selanjutnya disebut “Rumah Tangga Sasaran” (RTS).
--	--	--	--	--

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir efektivitas Program Raskin dapat ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada peristiwa pada masa sekarang.

Teknik pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang pokok dan secara umum menggunakan metode statistik (Singarimbun dan Effendi, 1995).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel teliti. Definisinya adalah sebagai berikut :

- 1. Program Raskin** adalah suatu program beras bersubsisidi bagi keluarga miskin menyediakan 15 kg beras per rumah tangga miskin dengan harga Rp.1.600 per kg, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indikator : tepat sasaran, penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga.

2. Ketahanan Pangan adalah adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Indikator : tidak kelaparan, gizi dan kesehatan, ekonomi (daya beli).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Medan Sinembah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Agustus 2017 hingga Oktober 2017.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah rumah tangga miskin di desa medan sinembah sebanyak 560.

2. Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan 10 % dengan derajat kepercayaannya 90% , artinya peneliti yakin bahwa dalam hal mengestimasi parameter populasi populasi tingkat kebenarannya 90%. Alasan peneliti menggunakan $\alpha = 10\%$ karena adanya keterbatasan waktu, biaya, sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus slovin (Sevilla et. Al.,1960:182), sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan error

Dengan menggunakan rumus Slovin :

$$\begin{aligned} n &= \frac{560}{1 + 560 \times 10\%^2} \\ &= 560/6.6 \\ &= 84.84 \hat{=} 85 \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini hanya di ambil 85 sampel sebagian dari populasi.

Pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan teknik Slovin

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif .

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder di peroleh di Desa Medan Sinembah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membuat (koesioner). Yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas dasar pertanyaan tersebut (Umar,2002). Dalam melakukan penelitian ini , data yang dikumpulkan akan

digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.. Dibandingkan dengan *interview guide*.

G. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian yang dilakukan. Analisis data deskriptif penelitian ini menggunakan metode rata – rata yang nantinya akan disajikan dalam bentuk grafik atau tabel tersebut akan mempermudah pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV

DESKIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Medan Sinembah

1.1 Kondisi geografis

Provinsi Sumatera Utara mempunyai 33 kabupaten kota , salah satu kabupaten yang termasuk luas daerah yang paling besar adalah kabupaten deli serdang yaitu seluas 2.808,91 km² dengan jumlah 22 kecamatan dan kecamatan yang letaknya di pinggiran perbatasan dengan medan adalah tanjung morawa yang merupakan salah satu sentra industri pengusaha Kota Medan. Tanjung Morawa terhubung dengan Medan melalui Tol Belmera. Tanjung Morawa terdiri dari beberapa kelurahan salah satu di antaranya desa medan sinembah.

Desa Medan Sinembah adalah salah satu desa kecil di Sumatera Utara , Indonesia tepatnya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Letaknya lebih kurang 14,1 Km ke kota Tanjung Morawa dan 24,5 Km ke kota Medan. Desa ini di kelilingi oleh perkebunan sawit, masyarakat setempat umumnya berdagang dan bertani, namun adapula yang bekerja di industri rumahan dan pabrik.

Secara geografis, wilayah Desa Medan Sinembah seluas 356 Ha. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Desa Limau Manis dan Ujung Serdang
- Batas Selatan : Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir

- Batas Timur : Desa Bandar Labuhan
- Batas Barat : Kecamatan Patumbak

Berdasarkan mutasi Kantor kepala Desa Medan Sinembah bulan 9 tahun 2017, jumlah penduduk Medan Sinembah berjumlah 7.589 jiwa, dengan komposisi penduduk laki laki berjumlah 3.817 jiwa dan penduduk berjumlah 3.772 jiwa.

Mayoritas para penduduk memeluk agama islam yaitu sebanyak 5.645 jiwa, agama kristen 1.909 jiwa, hindu 25 jiwa dan buddha 10 jiwa. Suku bangsa yang dapat di temukan di desa ini adalah Jawa, Batak , Mandailing , Tionghoa.

1.2 Kondisi Topografi

Letak Desa Medan Sinembah di atas permukaan laut adalah 0 – 35 meter. Berdasarkan topografinya daerah ini terletak pada daratan dengan luas wilayah 356 Ha. Banyak nya curah hujan pertahun rata – rata 2000 mm, dan suhu udara rata – rata 28⁰C.

Untuk komoditi tanaman perkebunan memiliki unggulan yaitu tanaman kelapa sawit, untuk unggulan keduanya adalah jagung, komoditi ketiganya adalah ubi kayu. Untuk hewan ternak yang banyak di Desa Medan Sinembah adalah unggulan pertamanya pelihara kerbau, unggulan keduanya adalah Kambing.

1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Medan Sinembah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 7.589 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki sebanyak 3.817 jiwa dan perempuan 3.772 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.696 jiwa.

Menurut jenis pekerjaannya penduduk Desa Medan Sinembah yang bekerja sebagai buruh 230 jiwa ,wiraswasta 58 jiwa, guru 29 jiwa, pensiunan 72 jiwa, pelajar 859 jiwa lain lain sebanyak.

Bisa di lihat dari tingkat pendidikan, penduduk Medan Sinembah sebanyak 7.589 jiwa dengan komposisi TK sebanyak 216 jiwa , SD sebanyak 1.576 jiwa, SMP sebanyak 805 jiwa , SMA sebanyak 742 jiwa, S1 sebanyak 25 jiwa dan S2 sebanyak 1 jiwa.

1.4 Sarana pendidikan, kesehatan , ibadah dan transportasi

Total sarana pendidikan di Medan Sinembah 19 unit, di mana terdapat 8 unit TK / Paud, 2 unit sekolah SD , 8 unit Sekolah SMP baik swasta maupun negeri dan 1 unit sekolah Smk.

Di Desa Medan Sinembah untuk tenaga kesahatan tidak memiliki puskesmas, tetapi memiliki 2 bidan untuk membantu masyarakat yang sedang sakit.

Sarana ibadah umat beragama di Desa Medan Sinembah adalah : 10 unit mesjid dan 4 gereja .

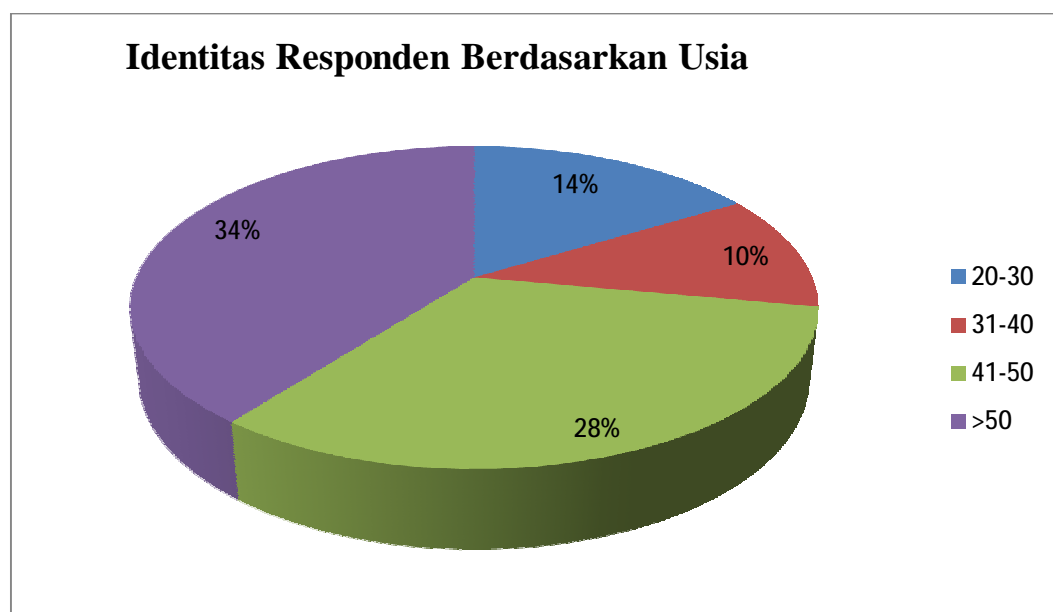
Sarana Transportasi antar dusun di desa Medan Sinembah telah dapat di lalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, dengan kondisi jalan yang di perkeras(aspal, krikil, batu dan sebagainya).

B. Pembahasan

Pada Bab ini penulis menganalisis data-data yang telah di peroleh dari hasil penelitian dengan menyebarkan angket (kuestioner) kepada masyarakat di Medan Sinembah yang telah di tetapkan sebagai responden, yaitu sebanyak 85

responden. Menganalisis data merupakan satu upaya untuk menata dan mengelompokkan data menjadi satu bagian – bagian tertentu berdasarkan jawaban sampel penelitian. Analisis data yang di maksud adalah interpestasi langsung berdasarkan data dan informasi yang di peroleh di lapangan.

Gambar 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Usia

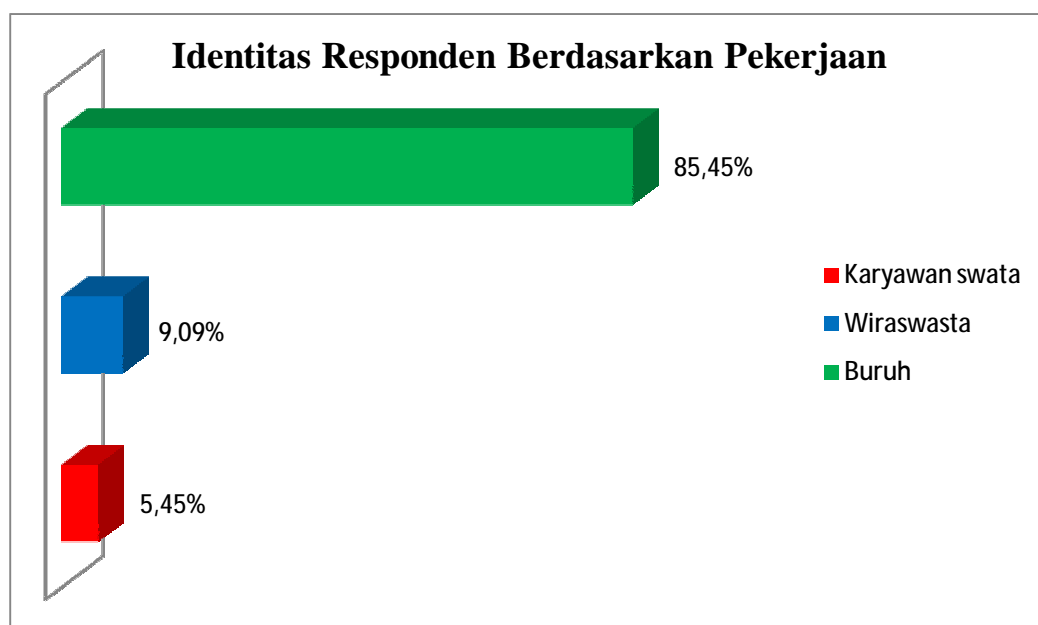


Sumber : di peroleh dari data Kuisieoner 2017

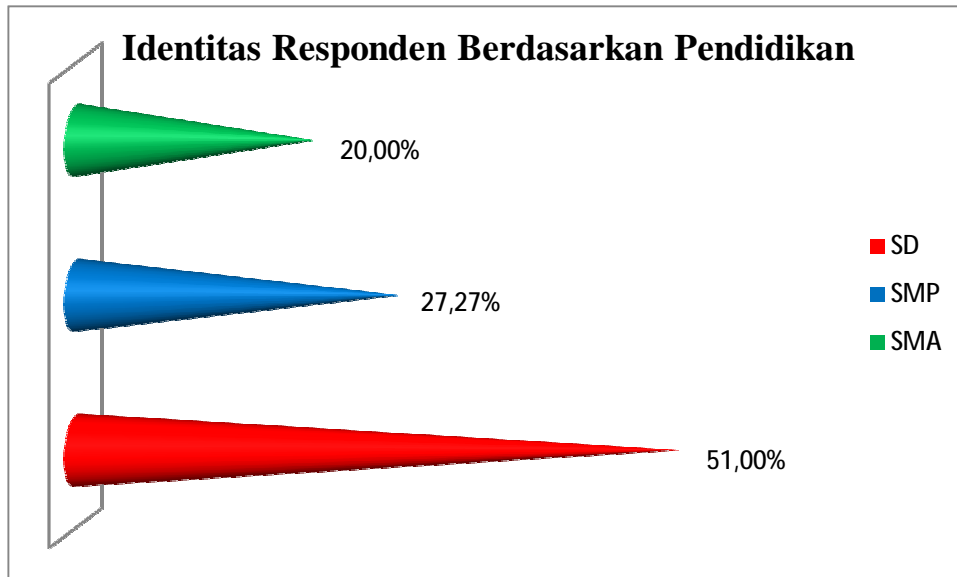
Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa usia rumah tangga penerima Raskin mulai dari 20 tahun hingga umur >50 tahun. Jumlah rumah tangga penerima Raskin dengan usia paling banyak adalah usia 50 tahun ke atas yaitu 34 % yaitu 20 orang, dan jumlah rumah tangga penerima Raskin yang paling sedikit adalah dengan usia 20 – 30 tahun ada 14 % yaitu 6 orang. Kemudian untuk usia 41 – 50 ada 28 % ada 19 orang dan untuk 31 – 40 ada 10 orang. Mengapa usia 50 tahun ke atas yang paling banyak mendapat raskin, karena memang di Desa Medan Sinembah lebih banyak penduduk menerima Raskin yang usianya sudah terlalu

tua, karena sudah tidak mampu untuk bekerja lagi dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari aja sudah susah, jadi dengan adanya Raskin ini masyarakat sedikit terbantu. Demikianlah peneliti menemukan sample usia penduduk di Desa Medan Sinembah.

Gambar 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan



Data diagram di atas jelas terlihat bahwa jenis pekerjaan terbesar kepala keluarga adalah buruh dengan jumlah 85,45% yaitu 47 rumah tangga, sedangkan pekerjaan kepala keluarga yang paling banyak kedua adalah wiraswasta 9,09% yaitu 5 rumah tangga, dan pekerjaan kepala keluarga yang paling sedikit adalah karyawan swasta dengan jumlah 5,45% yaitu 3 rumah tangga. Karena pada umumnya adalah buruh kasar, karena hal ini juga penghasilan mereka tidak menentu dan mereka berhak menerima Raskin.

Gambar 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari diagram di atas dapat kita lihat jumlah terbanyak adalah jenjang pendidikan SD/ sederajat di mana berjumlah 51 % yaitu 28 kepala keluarga. Sedangkan yang tamatan SMP berjumlah 27,27 % yaitu 15 kepala keluarga, dan yang tamatan SMA berjumlah 20 % yaitu 11 responden, walaupun dapat kita lihat bahwa tidak ada responden dari perguruan Tinggi, tetapi melihat banyaknya juga responden yang tamat SD menandakan bahwa penduduk di Desa Medan Sinembah sangat mementingkan pendidikan.

Dalam pembahasan ini penulis menyimpulkan dengan hasil kuisioner yang telah dilakukan dalam pengambilan raskin di Desa Medan Sinembah, bahwasannya masyarakat mendapatkan informasi adanya raskin dari setiap kepala dusun masing – masing, dengan cara berkumpul di rumah kepala dusun untuk mendapat kartu raskin adapun kriteria kriteria yang berhak mendapat kartu raskin yaitu masyarakat yang memiliki rumah :

1. luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang, jenis lantai tanah/bambu/kayu murahan, dinding rumah bambu atau kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas MCK,
2. penerangan bukan listrik,
3. sumber air minum bukan PDAM/tidak terlindung sungai dan air hujan,
4. tidak memiliki kompor atau menggunakan arang/kayu bakar,
5. membeli daging maksimal 1 kali sepekan,
6. 1 tahun membeli 1 stel pakaian baru,
7. frekuensi makan satu/dua kali sehari,
8. tidak mampu berobat ke Puskesmas/poliklinik,
9. lapangan pekerjaan buruh tani, buruh bangunan dan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600 Ribu per bulan,
10. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tidak tamat sekolah,
11. tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp. 500 Ribu, (Sumber: Data BPS).

kriteria tersebut telah di tentukan oleh BPS, pemberian raskin di Desa Medan Sinembah berupa beras sebanyak 10 kg , raskin sebanyak 10 kg di berikan selama 1 bulan sekali dengan tempat pengambilan berada di Kantor Kepala Desa Medan Sinembah , dengan syarat pengambilan masyarakat harus mempunyai kartu raskin yang telah di bagikan oleh Kepala dusun masing – masing.dari sebagian warga , raskin yang di terima memang di gunakan untuk kehidupan sehari – hari dengan adanya raskin ini masyarakat dapat terbantu dalam ketahanan pangan di mana harusnya uang untuk membeli beras ,jdi bisa di simpan untuk keperluan yang lain. Misalkan untuk pendidikan , di mana uang tersebut bisa untuk biaya anak mereka dan dalam hal yang lain.

Program raskin yang di sediakan oleh pemerintah cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin itu terbukti di mana masyarakat sangat antusias mengambil jatah raskin di Desa ini , walaupun kuantitas beras yang di berikan masih kurang memadai dengan jumlah anggota keluarga dari masyarakat miskin tersebut. Akan tetapi program raskin di Desa medan sinembah di berikan kepada yang berhak mendapatkannya, sehingga asumsi akan adanya penerima raskin yang masuk kategori memiliki ekonomi keuangan menengah ke atas menurut penulis tidak ada di berikan dengan kuisioner dan juga data yang di berikan oleh pihak balai desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , secara umum pelaksanaan Program Raskin di Desa Medan Sinembah berjalan cukup baik dan lancar, namun masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kurang efektif.hal tersebut dapat di tunjukkan lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan program baik dari tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaanya. Kelima indikator tesebut antara lain sebagai berikut :

1) Ketepatan komunikasi dan koordinasi

Komunikasi dan koordinasi antara pihak pelaksana desa di Desa Medan Sinembah dengan pihak BULOG sering mengalami kendala, hal ini di tunjukkan dengan tidak ikutnya petugas Raskin BULOG dalam pendistribusian beras di Desa, sehingga apabila terjadi permasalahan di titik distribusi, pihak desa tidak dapat berkoordinasi secara langsung dengan BULOG untuk segera melakukan tindakan penyelesaian.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan program raskin di Desa Medan Sinembah di tujukkan pada tahap pelaporan yang mana BULOG dan Pemerintah Kota Tanjung Morawa selalu memberikan laporan rutin tiap bulannya mengenai pelunasan pembayaran beras Raskin dan kegiatan monitoring.

3) Sumber Daya yang Memadai

Sumber Daya dalam Program Raskin ini meliputi : sumber daya manusia berupa pelaksana program dan sumber daya yang berupa sumber daya manusia(SDM) dalam Program Raskin, dalam hal ini adalah para pelaksana jumlahnya sudah cukup memadai namun belum dapat memberikan informasi secara detail/menyuruh kepada masyarakat tentang program pada saat sosialisasi.

4) Sikap Positif Pelaksana

Sikap positif pelaksana terlihat dari kemauan mereka melakukan sosialisasi program, meskipun pelaksana tersebut lebih banyak melimpahkan tugas ke bawahan. Namun demikian, pelaksana masih menunjukkan sikap bahwa merekalah yang menentukan keputusan tanpa meminta partisipasi masyarakat.

5) Dukungan dan Partisipasi Kelompok Sasaran

Dukungan kelompok sasaran terlihat dari antusiasme mereka dalam membeli beras raskin. Dukungan Rumah Tangga sasaran (RTS) sebagai kelompok sasaran terlihat cukup besar, terlihat pada kemauannya membeli beras tersebut.

B. Saran

Guna lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin di Desa Medan Sinembah dapat di lakukan berbagi upaya perbaikan. Menurut penulis upaya tersebut dapat di lakukan melalui :

1. Penulis menyarankan bahwa Program Raskin masih tetap di perlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi masalah kekurangan gizi pada masyarakat terutama masyarakat miskin.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Raskin maka sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Program Raskin secara terus menerus perlu di lakukan.
3. Karena masih di temukan adanya warga miskin yang tidak mendapatkan jatah beras Raskin, penulis menyarankan agar ada penambahan kuota Raskin.
4. Perlu adanya pendataan ulang keluarga sasaran dengan metode yang lebih realistis dengan penemuan kriteria yang rasional. Pendataan RTS yang di lakukan oleh BPS harus selalu *up to date*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada
- Desa Medan Sinembah. 2016. *Data Kemiskinan*. Tanjung Morawa
- Harmoko, Pedro. 2010. *Efektivitas Program Raskin Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Tahun 2009* <http://digilib.uns.ac.id>
- Mudrajat, Kuncoro. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Panggayuh, Singgih. 2014. *Efektivitas Pengolahan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*. <http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk>
- Sundari , Irma.2011.*Analisis Raskin Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia*.
- Linguistikid.blogspot.co.id